



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa dengan dilakukannya penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 920);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana

- Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1194);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 444);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 417);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
 - 2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II; dan

- 3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
5. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	PEJABAT	JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
2.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Jenderal
3.	Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
4.	Direktur Jenderal Anggaran	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Anggaran
5.	Direktur Jenderal Pajak	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak
6.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7.	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8.	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
9.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
10.	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
11.	Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
12.	Inspektur Jenderal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Jenderal
13.	Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
14.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

NO.	PEJABAT	JABATAN
15.	Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lembaga <i>National Single Window</i>
16.	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
17.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Sekretariat Jenderal
18.	Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
19.	Sekretaris Direktorat Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran
20.	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak
21.	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
22.	Sekretaris Direktorat Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan
23.	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
24.	Sekretaris Direktorat Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
25.	Sekretaris Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
26.	Sekretaris Direktorat Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

NO.	PEJABAT	JABATAN
27.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Inspektorat Jenderal
28.	Sekretaris Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
29.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
30.	Sekretaris Lembaga <i>National Single Window</i> , Lembaga <i>National Single Window</i>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Lembaga <i>National Single Window</i>
31.	Para Kepala Kantor Wilayah/para Kepala Kantor Pelayanan Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II
32.	Direktur Keuangan dan Umum, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
33.	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Badan Pengelola Dana Perkebunan
34.	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
35.	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Pusat Investasi Pemerintah
36.	Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan, Lembaga Manajemen Aset Negara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Manajemen Aset Negara
37.	Direktur Keuangan dan Umum, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
38.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Politeknik Keuangan Negara STAN	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Politeknik Keuangan Negara STAN
39.	Para Kepala Kantor Pelayanan/para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III
40.	Para Kepala Balai di lingkungan Kementerian Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III

NO.	PEJABAT	JABATAN
41.	Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

